Arah RPJMD Jabar 2008-2013

Oleh Dr. Atih R. Dariah

Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013 merupakan salah satu program kerja 100 hari gubernur dan wakil gubernur terpilih. Proses penyusunan baru dimulai pada minggu ke-4 di bulan Juni. Berkat kerja keras tim, hasil sementara sudah dapat disajikan dalam "focus group discussion" (FGD) 16 Juli di Bapeda Provinsi Jabar. FGD merupakan salah satu pendekatan dalam proses penyusunan perencanaan yakni partisipatif, sedangkan pendekatan lainnya politik, teknokratik, "bottom-up", dan "top-down". Pendekatan politik memandang bahwa rencana pembangunan merupakan penjabaran dari visi misi dan agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah di saat melakukan kampanye.

Asumsinya, ketika mereka menang berarti sebagian besar rakyat pemilih "merestui" program tersebut sehingga visi misi kepala daerah terpilih merupakan dasar pijakan dalam penyusunan RPJMD. Kalau begitu seberapa besar ruang untuk mengakomodasi pendekatan aspek lainnya? Seperti pendekatan teknokratik yakni berdasarkan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk itu, juga pendekatan partisipatif dan pendekatan bottom-up dan top-down? Apakah ada pembobotan yang proporsional antarpendekatan? Jika terdapat perbedaan pandangan krusial antarpihak aktor di balik setiap pendekatan, seberapa besar tingkat kompromi yang dilakukan? Jangan sampai prosesi penyempurnaan dokumen perencanaan sebatas formalitas atau sosialisasi yang tidak sampai pada sasaran akhir yakni perwujudan visi itu sendiri.

Satu hal mendasar dalam RPJMD adalah dimensi waktu yang cukup pendek dilihat dari proses pembangunan itu sendiri dan tetap harus mengacu pada RPJM nasional. Selain itu, RPJMD provinsi harus menjadi payung bagi kegiatan ekonomi di kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat memiliki visi yang ditetapkan dengan Perda No. 1 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat, yaitu "Jawa Barat Dengan Iman dan Takwa sebagai Provinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibukota Negara Tahun 2010". Visi tersebut merupakan hasil dari rangkaian dialog sejak 1999 sampai akhir 2000. Ukuran keberhasilan pencapaian visi Jawa Barat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80 pada 2010.

Visi gubernur terpilih untuk kepemimpinan lima tahun ke depan adalah "Mencapai Masyarakat Jawa Barat Mandiri, Dinamis dan Sejahtera Tahun 2013". Banyak pihak mempertanyakan ukuran sejahtera? Bukankah IPM yang merupakan indeks komposit yang terdiri dari indeks pendidikan, kesehatan, dan daya beli sudah sangat memadai sebagai ukuran kesejahteraan? Peletakan IPM sebagai target dari perencanaan sudah tepat, sosialisasi IPM sampai ke perdesaan pun sudah berlangsung, jadi jangan sampai kabur dan tidak populer lagi di kalangan stakeholder hanya karena adanya pergantian kepemimpinan.

Alangkah baiknya arah RPJMD 2008-2013 Provinsi Jawa Barat konsisten untuk mencapai IPM yang memadai dalam arti menunjukkan peningkatan kesejahteraan namun realistis sesuai kapasitas sumber daya yang dimiliki. Dalam pandangan ilmu ekonomi, terjadi optimalisasi tujuan dengan memperhitungkan constraint yang ada. Pihak-pihak teknokratik tentunya sangat memahami komponen mana yang sudah cukup memadai dan mana yang masih jauh dari memadai. Berdasarkan evaluasi dapat teridentifikasi faktor-faktor dominan determinasi kinerja yang tidak sesuai harapan tersebut. Permasalahannya, sejauh mana kedalaman evaluasi terhadap aspek krusial yang memiliki keterkaitan luas dengan aspek-aspek lainnya?

Dari data statistik diketahui pencapaian indeks terendah adalah indeks daya beli yang diperkuat oleh kecilnya angka purchasing power parity (PPP). Berdasarkan data dari SNSE (sistem neraca sosial ekonomi) Jabar diketahui bahwa golongan rumah tangga terbesar jumlahnya dan terendah pendapatannya adalah buruh tani. Jadi, mereka yang masih bergelut di sektor pertanian sebagai buruh tani sangat rentan dengan status miskin secara ekonomi. Jumlah golongan rumah tangga terbesar kedua jumlahnya dan terendah kedua pendapatannya di antaranya buruh, pedagang kecil.

Tim peneliti dari Prodi Ilmu Ekonomi Unisba pernah melakukan simulasi dengan menggunakan model SAM (social accounting matrices) dalam rangka mengidentifikasi sektor ekonomi yang paling signifikan berpengaruh pada peningkatan pendapatan kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan rendah di desa dan kota. Hasil simulasi memperlihatkan bahwa ada lima sektor ekonomi yang diprediksi akan berdampak signifikan pada perbaikan daya beli masyarakat Jawa Barat jika mereka tumbuh. Kelima sektor tersebut adalah sektor jasa-jasa, sektor industri makanan dan minuman, sektor bangunan/konstruksi, sektor perdagangan hotel dan restoran, dan sektor pertanian. Jadi terintegrasi antara sektor primer, sekunder, dan tersier.

Dari survei ke 124 pelaku usaha yang tersebar di beberapa wilayah Jawa Barat dan mewakili kelima sektor tersebut diketahui beberapa permasalahan krusial. Masalah utama di sektor pertanian adalah masalah kelembagaan, yakni pasar dan harga, aktivitas terbatas pada menanam sehingga nilai tambah komoditas rendah. Dengan demikian, membangun sektor pertanian diprioritaskan untuk inovasi aspek kelembagaan yang terkait dengan pasar dan harga, riset pengembangan komoditas yang sesuai dengan kondisi lokal, riset penciptaan nilai tambah komoditas, dan infrastruktur perdesaan. Yang dimaksud dengan inovasi aspek kelembagaan yang terkait dengan pasar dan harga adalah terobosan sistem pemasaran yang bisa meningkatkan posisi tawar petani. Di antaranya mengembangkan lembaga kerja sama di antara petani, meningkatkan kemitraan dengan sektor industri pengolahan, mengembangkan pasar lelang yang mencakup wilayah dan komoditas, introduksi pasar petani di perkotaan.

Sementara yang dihadapi pelaku di industri makanan adalah naiknya biaya produksi dan tidak stabilnya harga bahan baku, akses modal untuk meningkatkan skala usaha, pemasaran produk, dan pemanfaatan teknologi. Yang menggembirakan, survei menemukan adanya upaya-upaya beberapa responden berkreasi dalam produk yang bisa diterima pasar sebagai langkah untuk meraih konsumen dan membangun citra seperti yang dilakukan industri kue dan roti, keripik, dan ragam snack lainnya. Selain itu, upaya pembenahan manajemen pemasaran terus dilakukan, termasuk pekan discount. Ini merupakan modal besar untuk mengembangkan usaha dan memenangkan persaingan. Dengan adanya tol Cipularang, responden diuntungkan karena pembeli semakin banyak.

Dengan melihat besarnya potensi pengembangan industri makanan di Jawa Barat, bentuk dan arah kebijakan sebaiknya fokus pada riset diversifikasi utilisasi produk-produk pertanian menjadi makanan olahan yang semakin beragam. Dan seyogianya hasil riset tentang utilisasi produk-produk pertanian menjadi makanan olahan yang semakin beragam dapat diterapkan di perdesaan, selain dekat dengan bahan baku, juga diharapkan akan menjadi stimulan untuk berkembangnya ekonomi perdesaan.

Survei khusus tentang prosedur investasi ke 81 pengusaha di sektor core business Jawa Barat, ditemukan bahwa jangka waktu penyelesaian yang tidak pasti, biaya yang relatif besar dibandingkan dengan tarif resmi, banyaknya izin dengan prosedur berbelit-belit menjadi hambatan realisasi investasi. Sudah sepantasnya Pemprov Jawa Barat menetapkan standar minimal penyederhanaan perizinan yang berlaku untuk kabupaten/kota. Ada dua tawaran untuk merealisasi standar minimal yang dimaksud, yakni sistem perizinan terpadu atau tetap berantai namun dengan koordinasi di satu pintu di antara instansi yang selama ini memiliki kewenangan mengeluarkan izin.

Berdasarkan temuan-temuan survei tersebut, ternyata kunci pengembangan kelima sektor ekonomi yang akan berdampak pada peningkatan daya beli adalah inovasi produk dan kelembagaan, ketersediaan pendanaan, dan iklim usaha yang kondusif. Di sinilah bagaimana pemerintah harus berperan sebagai regulator yang bisa menawarkan insentif bagi pelaku ekonomi. Pertama, mempertemukan dunia pendidikan dengan pelaku usaha agar riset yang akan dilakukan komunitas akademik selaras dengan kebutuhan dunia usaha sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan. Kedua, menggapai dunia perbankan agar melakukan diskriminasi besaran suku bunga untuk usaha mikro dan kecil. Ketiga, mendorong kemitraan antara pengusaha mikro, kecil dengan usaha besar yang sejenis untuk mendorong terjadinya transfer teknologi. Keempat, menghapus citra sulitnya birokrasi melalui peningkatan pelayanan publik secara prima seperti aparatur yang profesional, transparan, dan cepat waktu.

Tampaknya misi yang sudah dibuat oleh gubernur terpilih sudah mengakomodasi isu-isu tersebut, tinggal memoles agar lebih fokus dan memberi ruang bagi partisipasi seluruh stakeholder sesuai porsi secara proporsional.***

Penulis, Ketua Prodi Ilmu Ekonomi Unisba Bandung.

Sumber:

Pikiran Rakyat, Selasa, 29 Juli 2008

<http://newspaper.pikiran-rakyat.co.id/prprint.php?mib=beritadetail&id=25214>